

# KEPENTINGAN SURIAH MENJALIN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN LEBANON (2008)

OLEH:

Aridianto Widodo

[aridiantomd@gmail.com](mailto:aridiantomd@gmail.com)

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/fax.0761-63277

## ABSTRACT

*This research describes about syria interests in Lebanon in conducting diplomatic relations. In the beginning, Syria did not agree with the establishment of the Lebanese State because it leads to reduced part of Syrian territory. Syria initially determined not to open formal diplomatic relations with Lebanon. In 2008 Syria began to open the way for diplomatic relations. The attitude of Syria in opening diplomatic relations with Lebanon certainly has its own importance.*

*This research uses a realist perspective. Where the realist focused that the State is a major actor in international politics. Syria opened relations with Lebanon to achieve the interests of his country. In this paper, the author uses the analysis of the level of the nation state that focuses on the discussion of the diplomatic relations forged by Syria in Lebanon. The author uses the method of library research to collect data, the data collection methods of books, journals, articles, internet and other supporting media.*

*The results of this research indicate that Syria has a national interest in Lebanon. Therefore, syria opened diplomatic relations with Lebanon which will provide benefits in syria, namely in the field of military security, and regional integration.*

*Keywords :diplomatic relations, national interest, regional integration.*

## Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Suriah menjalin hubungan diplomatik dengan Lebanon (2008). Penulisan penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor kepentingan Suriah dalam menjalin hubungan diplomatik dengan

Lebanon. Penulis memilih periode tahun 2008 karena pada tahun-tahun sebelumnya, Suriah tidak pernah mengakui keberadaan Lebanon sebagai sebuah Negara, menganggap bahwa Lebanon adalah bagian dari wilayah Suriah yang kemudian terpisah diakibatkan kolonialisme Perancis. Pada

masa lalu Suriah memiliki wilayah yang sangat luas di sebelah timur Laut Mediterania, wilayah ini yang kemudian terpecah akibat dari Imperialisme Barat menjadi beberapa negara yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, Provinsi Turki Hatay, Israel dan Palestina yang sebagiannya diakui sebagai Israel. Perancis dengan politik *divide et impera* nya berhasil membagi Suriah sendiri menjadi empat wilayah antara lain : Damaskus, Lebanon Raya, Aleppo dan Lantakia. Tahun 1925 Damaskus dan Aleppo dikembalikan kepada Suriah.<sup>1</sup>

Perancis pada tanggal 28 September 1941 memberikan kemerdekaan kepada Suriah, dan diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941. Untuk pelaksanaannya, Jenderal Catroux mengangkat Seikh Taj ad-din sebagai Presiden Suriah dan Alfred Naccache sebagai Presiden Lebanon.<sup>2</sup> Pada tahun 1973 perang antara Arab-Israel kembali berkecamuk yang bermula dari perang antara Mesir-Israel, inisiatif perang tersebut dimulai oleh Mesir yang didasarkan atas tindakan Israel menyerang Lebanon Selatan yang merupakan pusat gerilyawan Palestina. Tindakan Mesir tersebut mendapat dukungan dari negara Arab lainnya. Bersama dengan Suriah, Mesir berhasil merebut benteng Israel “Lini Berlev” pada tanggal 6 Oktober 1973. Sementara Suriah sendiri melakukan perlawanan terhadap Israel tidak kalah gencarnya sehingga mampu menggagalkan setiap usaha negara tersebut untuk merebut wilayah Suriah. Tetapi pada tanggal 9-10 Oktober 1973 Israel berhasil melumpuhkan Suriah dengan membombardir Damaskus tanpa perlawanan berarti dan Suriah kembali

kehilangan sebagian lagi wilayah Dataran Tinggi Golan.<sup>3</sup>

Berperannya Suriah dalam konflik di Lebanon diawali tahun 1976 berdasarkan mandat dari Liga Arab. Selain penempatan Suriah di Lebanon dimaksudkan untuk menghentikan perang saudara dan pertumpahan darah, juga dimaksudkan untuk mencegah pembagian Lebanon dan intervensi asing yang akan mempersulit penyelesaian konflik. Usaha Suriah tersebut dituangkan dalam program pembaharuan yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 1976 oleh Presiden Suriah yang berisi bahwa tidak ada yang menang atau kalah, sistem bagi kekuasaan atas dasar agama masih dipertahankan tapi umat Islam mendapatkan bagian kekuasaan yang lebih besar walaupun kedudukan umat Kristen masih lebih baik.<sup>4</sup>

Pada tahun 1980 kondisi di Lebanon ditandai dengan kemunculan milisi-milisi baru bersenjata yang sebagian besar berafiliasi dengan negara lain. Hizbullah (Syiah), Partai Nasional Liberal (Maronit), Tauhid (Sunni), Murabitun (Sunni), Tentara Pembebasan Palestina (PLO), gerakan nasional (Nasseris) dan Jihad Islam (Syiah). Hizbullah, Tauhid, dan Jihad Islam mempunyai hubungan erat dengan Iran, sedangkan PLO dan gerakan Nasional mendapat dukungan dari Suriah dan Partai Nasional Liberal mendapat dukungan dari Israel.<sup>5</sup> Hal ini dibuktikan bahwa semakin tajamnya fragmentasi dari berbagai pihak, Islam, Kristen, Palestina dalam konflik di Lebanon. Tiga milisi pro Iran yaitu Hizbullah, Tauhid dan Jihad Islam

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 203-205

---

<sup>3</sup> Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Penerbit Mizan, Bandung, 1993, hlm 66.

<sup>4</sup> Kirdi Dipoyuda, *Timur Tengah dalam Pergolakan*, CSIS, Jakarta, 1992, hlm 163.

<sup>5</sup> Riza Sihbudi, *op.cit*, hlm 34.

menginginkan negara Islam modern Iran di Lebanon sedangkan NPL dan SLA (South Lebanon Army) menghendaki Lebanon bekerjasama dengan Israel.

Suriah melihat perkembangan perang saudara di Lebanon tersebut sebagai kesempatan untuk mengembalikan Lebanon kepada Suriah, sesuai keinginan Suriah untuk mewujudkan Suriah Raya seperti keinginan Presiden Suriah Hafiz Al Ashad. Karena sebenarnya Suriah tidak menyetujui pembentukan negara Lebanon yang berdiri sendiri. Suriah beranggapan bahwa Lebanon merupakan ciptaan politik kolonial Perancis bahwa sebelum Perancis masuk Suriah pada abad ke XIX Lebanon, Turki, Yordania, Israel dan Propinsi Hatay di Turki merupakan bagian dari wilayah Suriah.<sup>6</sup> Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Lebanon merupakan bagian dari Suriah. Hal tersebut menjadi salah satu sebab Suriah tidak menginginkan kemenangan pada konflik di Lebanon, karena Suriah menginginkan berdirinya pemerintahan di Beirut dibawah kekuasaan Damaskus. Hal inilah yang menyebabkan Suriah tidak pernah membuka hubungan diplomatik resmi dari Lebanon dan antara Suriah dan Lebanon tidak ada perwakilan kedutaan.

Hubungan Suriah dan Lebanon putus akibat pembunuhan mantan perdana menteri Lebanon Rafiq Hariri di Beirut pada 2005, Lebanon menuduh Suriah mendalangi pembunuhan itu dan Suriah akhirnya menarik pulang pasukannya. Keinginan Suriah mewujudkan Suriah Raya dengan menjadikan Lebanon masuk dalam wilayah Suriah dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Lebanon dan putusnya hubungan Suriah-Lebanon akibat Lebanon menuduh Suriah terlibat dalam pembunuhan

mantan perdana menteri Lebanon Rafiq Hariri menunjukkan sikap politik luar negeri Suriah terhadap Lebanon. Perubahan politik luar negeri Suriah terhadap Lebanon pada tanggal 15 Oktober 2008 dengan membuka hubungan diplomatik dengan Lebanon berdasarkan surat keputusan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memuluskan jalan bagi pembukaan hubungan diplomatik penuh dengan Lebanon. Keputusan ini menegaskan pembentukan hubungan diplomatik antara Republik Arab Suriah dan Republik Lebanon serta pembentukan misi diplomatik pada tingkat duta besar di ibu kota Lebanon, Beirut. Pembukaan hubungan diplomatik Suriah dan Lebanon dilakukan setelah pertemuan kedua presiden yang menyepakati sejumlah hal, antara lain, pembahasan ulang garis perbatasan wilayah Lebanon dan Suriah, pembukaan kedutaan besar, serta kerjasama militer. Pernyataan ini menegaskan kembali keinginan kedua belah pihak untuk menegaskan dan mengkonsolidasikan hubungan dengan dasar saling menghormati kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing dan memelihara hubungan persaudaraan kedua negara yang bersahabat untuk merespon aspirasi rakyat kedua negara.<sup>7</sup>

## Pembahasan

Pada masa lalu Suriah merupakan istilah geografis bagi seluruh wilayah yang meliputi Suriah, Lebanon, Palestina dan Israel sekarang yang dahulu dikenal dengan nama wilayah *Syam*. Suriah atau yang dahulu dikenal sebagai *Syam* memiliki wilayah yang sangat luas di sebelah timur Laut Mediterania, wilayah ini yang

---

<sup>6</sup> Bannerman, *The Syria Arab Republic, dalam The Government and Politics*, hlm 784

---

<sup>7</sup> *Setelah 60 Tahun, Suriah-Lebanon Sepakat Jalin Hubungan Diplomatik*, <http://www.jisc.eramuslim.com>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2014 Pukul 21.00 WIB

kemudian dipecah oleh negara Barat menjadi beberapa negara yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina yang sebagiannya diakui sebagai Israel.<sup>8</sup> Suriah merupakan negara yang menghubungkan tiga benua yaitu Eropa, Asia dan Afrika sehingga Suriah dikatakan sebagai jalur perdagangan, tempat terjadinya transfer budaya antar peradaban dan wilayah yang banyak diperebutkan berbagai dinasti dan imperium. Selain itu pada masa kekuasaan Islam, Suriah menjadi pusat kekhalifahan Islam yang menguasai wilayah dalam ruang lingkup yang lebih besar dari imperium Romawi mulai dari Perancis, Spanyol, Asia Tengah dan India.

Suriah merupakan salah satu peradaban paling tua di muka bumi, pada tahun 1975 para arkeolog di kota Ebila bagian Utara Suriah menemukan sebuah kerajaan yang sempat berdiri dan berkembang dari Laut Merah ke Turki dan Mesopotania pada 2500-2400 SM. Peradaban yang di wilayah ini dimulai dengan munculnya bangsa Funisia sebagai nenek moyang mereka yang menguasai wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1600 SM, wilayah Suriah pernah dikuasai oleh bangsa Mesir, dan dikuasai oleh bangsa Aramea pada tahun 1200 SM yang pada saat itu menamai wilayah kekuasaannya “Suriah” berasal dari kata *Syriac* dialek Aramea serta mendirikan kota Damaskus sebagai pusat kegiatan dan tempat tinggal masyarakatnya. Pada abad ke-6 SM, Suriah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Persia, yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Imperium Iskandar Agung yang telah berhasil menghancurkan kekuatan Kekaisaran Persia dan membuka jalan bagi penaklukan Suriah oleh Imperium Romawi

---

<sup>8</sup> Drs. Riza Sihbudi dkk. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

pada abad ke-4 SM. Terpecahnya Imperium Romawi pada abad ke-4 sesudah Masehi menjadikan Suriah berada dibawah kekuasaan Imperium Bizantium yang berpusat di Konstantinopel.<sup>9</sup>

Selanjutnya pada tahun 634-634 M kaum Arab Muslim berhasil merebut Suriah dari Kekaisaran Bizantium memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini yaitu bahasa Arab dan agama Islam. Kemudian pada tahun 661-750 Dinasti Umawi memerintah Suriah. Wilayah Suriah mengalami pergantian pemerintahan dari Arab Muslim, Tentara Salib, Mongol serta Mamluk hingga menjadi bagian Imperium Ottoman, Turki dari tahun 1516 sampai tahun 1920, setelah ditaklukkan oleh Imperium Ottoman Turki, yang pada saat itu dalam perjalanan menyerang Mesir, termasuk wilayah Lebanon yang diserahkan kepada Perancis pada saat Imperium Ottoman Turki kalah dalam Perang Dunia I.

Kekalahan Turki dalam perang dunia I, menyebabkan Turki harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya berada dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, rencana untuk menguasai Suriah Raya telah jauh hari direncanakan oleh pihak Eropa selama berlangsungnya Perang Dunia I. Para pemimpin Eropa yang terlibat Perang Dunia I, yang mana ketika itu menjadi musuh dari Kekaisaran Ottoman, telah menyusun perjanjian tentang bagaimana tanah yang berada dibawah kekuasaan Ottoman akan dibagi setelah perang. Perjanjian Sykes-Picot antara Perancis dan Inggris menjamin kekuasaan

---

<sup>9</sup>Kebijakan Luar Negeri dan Perkembangan Perekonomian Suriah, Maret 2008  
<<http://www.kemlu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1276>> (Diakses 28 Juni 2014)

Perancis atas pantai Suriah dan kontrol secara tidak langsung terhadap Suriah.<sup>10</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1920, Perjanjian Sevres menyebutkan bahwa Suriah Raya berada dibawah kendali Perancis sebagai mandat teritorial Perancis. Perancis mendapatkan hak atas *Levant* (istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon) dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang Akta mandatnya ditanda tangani di London pada 24 Juli 1922. Alasan Prancis mendapatkan hak atas Levant sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Perancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya perang salib. Pada saat itu Perancis menerima Kapitulasi Sultan mengenai izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Perancis di Suriah. Hubungan baik tersebut dilanjutkan oleh Henry IV, Richelieu dan Louis XIV. Pada 1740, Perancis memperbarui kapitulasi dengan tambahan reverensi khusus atas Levant mengenai tempat-tempat suci di Palestina dan hak istimewa Perancis tersebut dikukuhkan melalui perjanjian pribadi Napoleon dengan Sultan yang berkuasa atas wilayah Suriah pada 1802. Kondisi tersebut selanjutnya mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Prancis dengan umat Katolik Maronit.<sup>11</sup>

Perancis menyebut dirinya sebagai pelindung bagi orang-orang Kristen di seluruh wilayah Suriah Raya. Untuk melindungi kepentingannya, Perancis berkeinginan untuk mendorong terciptanya perpecahan antar agama, etnis, dan daerah dalam Suriah karena kesatuan politik akan mengancam jalannya kepentingan militer dan politik Perancis di Suriah Raya.

Perpecahan ini termasuk berdirinya Lebanon Raya sebagai mandat terpisah dari Suriah. Perancis memastikan yang akan menjadi kelompok agama terbesar di Lebanon yang baru dibentuk adalah Kristen Maronit. Selanjutnya, Suriah kemudian dibagi menjadi 5 daerah otonom politik yang terpisah, seperti : Negara Damaskus, Negara bagian Aleppo, Negara Alawi, Negara Jabal al-Druze, dan Sanjak dari Alexandretta, untuk mencegah terjadinya gerakan nasionalis Suriah. Sementara etnis Maronit menginginkan terciptanya negara Kristen yang dipengaruhi oleh budaya Perancis, etnis muslim Sunni dalam mandat yang baru dibentuk itu menginginkan masuknya Lebanon ke dalam Suriah. Tumbuhnya nasionalisme Arab di Suriah menjadi kekecewaan tersendiri bagi Perancis karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya di Levant, selain itu masyarakat Suriah pada saat itu lebih setuju berada dibawah mandat Inggris atau Amerika dari pada Prancis. Melihat kondisi tersebut, Prancis selanjutnya menyerang Damaskus dan mengusir Emir Faisal sebagai pemimpin tentara padang pasir yang nasionalis yang memiliki kekuasaan atas daerah pedalaman Suriah pada saat itu.<sup>12</sup>

Setelah berhasil menguasai Suriah secara utuh, Perancis mulai melaksanakan politik *divide et impera* dengan memecah belah wilayah Suriah menjadi empat bagian yaitu Lebanon Raya, negara Damaskus meliputi Jabal Druze, Aleppo termasuk sanjaq Alexandretta dan wilayah Lattakia atau wilayah Alawi. Pengawasan atas Levant sendiri dilakukan oleh Komisaris Tinggi Perancis. Dari keempat wilayah yang dibentuknya, Perancis relatif berhasil di Lebanon dan Lattakia. Penduduk Lebanon yang mayoritas beragama Kristen lebih

<sup>10</sup> Cleveland, William, *Op.cit*, hlm 163.

<sup>11</sup> George Lenczowski, *Loc.cit*, hlm 198

<sup>12</sup> Cleveland, William, *Op Cit*, hlm 225

menikmati status terpisahnya dan lebih berharap mendapat perlindungan dari Perancis. Pada tahun 1925, Dewan Perwakilan Lebanon bentukan Perancis membuat rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang dasar oleh komisaris tinggi pada Mei 1926 dan mensahkan sistem negara parlementer mengikuti pola barat. Dalam pasal 30 konstitusinya menyebutkan mengenai hubungan republik yang bergantung pada Perancis. Konstitusi tersebut diamandemen oleh pemerintah Lebanon pada 1927 dan 1929.<sup>13</sup>

Pada tahun 1943, Suriah dan Lebanon mendapatkan kemerdekaan sementara dari Perancis. Sebelumnya, pada 28 September 1941, Jenderal Catroux memproklamasikan kemerdekaan Suriah, yang isi naskahnya adalah:

1. Suriah berhak menjadi negara merdeka dan berdaulat;
2. Suriah berkuasa menunjuk perwakilan diplomatiknya;
3. Suriah berhak menyusun angkatan perangnya;
4. Suriah bersedia membantu Perancis selama perang;
5. Segala syarat terdahulu dengan perjanjian Perancis-Suriah yang baru yang menjamin kemerdekaan Suriah.

Tindakan tersebut juga diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941. Isi naskahnya hampir sama dengan isi naskah proklamasi Suriah. Untuk pelaksanaannya Jenderal Catroux mengangkat Seikh Taj ad-din sebagai

presiden Suriah dan Alfred Naccache sebagai presiden Lebanon.

Menanggapi hal tersebut, Inggris mengakui kemerdekaan kedua negara tersebut secara *de jure*, dan mengangkat Jenderal Spear sebagai duta besar pertama untuk kedua negara tersebut. Negara-negara Arab lainnya justru merasa ragu dengan kejadian tersebut, dilain pihak Amerika tidak langsung mengakui kemerdekaan kedua negara baru tersebut tetapi bersikap menunggu proses berakhirnya mandat secara resmi dan tercapainya keepakatan resmi bilateral Prancis dengan Suriah dan Lebanon.<sup>14</sup>

Di lain pihak, Perancis ternyata masih belum siap untuk mengalihkan fungsi pemerintahan secara langsung kepada kedua negara tersebut. Ditundanya penyusunan konstitusi dan penunjukkan presiden oleh pihak Perancis menimbulkan pertentangan baru dalam masyarakat, terutama dari para kelompok nasionalis dan kelompok sayap-kiri; sosialis dan komunis. Akibat kondisi tersebut, pemerintah Perancis akhirnya memutuskan memberlakukan kembali konstitusi lama yang pernah dibuat pada Maret 1943 dan mengupayakan diselenggarakannya pemilihan umum sesegera mungkin. Meski demikian kemerdekaan secara sempurna ternyata belum dirasakan oleh kedua negara tersebut karena pengawasan Perancis yang masih ketat terhadap kelangsungan pemerintahan keduanya. Delegasi Jenderal masih memiliki hak untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan parlemen dan menghapuskan konstitusi dengan alasan sesuai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Perancis juga masih menguasai tata tertib pemerintahan dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan dan sensor atas jurnalistik. Lebih jauh lagi agen

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 333

---

<sup>14</sup> George lenczowski, *op.cit* hlm 203-205

intel Perancis *Services Speciaux* masih banyak berkeliaran di kedua negara tersebut.<sup>15</sup>

### **Kebijakan Luar Negeri Suriah terhadap Lebanon**

Lebanon dan Suriah adalah negara yang memiliki hubungan khas tersendiri, secara adat istiadat ditinjau dari sejarah keduanya maupun secara geografi, Suriah dengan Lebanon merupakan negara bertetangga yang berbatasan wilayahnya secara daratan. Lebanon merupakan negara dengan luas wilayah sekitar 10.400 km persegi yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel. Pada tahun 1975, Lebanon mengalami perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok agama dan pemerintah Lebanon sendiri mengalami kesulitan dalam menangani konflik yang terjadi.<sup>16</sup>

Masuknya pasukan militer Suriah dalam upaya meleraikan konflik internal Lebanon pada tahun 1976, adalah atas permintaan dari kekuatan yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan Lebanon. Di pihak lain, Liga Arab juga menyatakan dukungannya pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Riyadh tahun 1976 terhadap keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon. Pasukan militer Suriah sebanyak 35000 personel masuk ke Lebanon sekitar bulan Januari 1976, sembilan bulan setelah berkobarnya perang saudara di Lebanon, Suriah melakukan penyelesaian konflik melalui gencatan senjata. Setelah upaya gencatan senjata dilakukan dan konflik secara terbuka bisa dilerai, hal tersebut tidak mengakhiri keberadaan

pasukan militer Suriah di Lebanon.<sup>17</sup> Peranan pasukan militer Suriah selama ditempatkan di Lebanon awalnya adalah berusaha mengatasi perang saudara yang terjadi di Lebanon, tetapi selanjutnya pasukan militer Suriah justru terlibat tidak hanya dalam masalah konflik internal yang terjadi di Lebanon bahkan dengan masalah eksternalnya yaitu dalam masalah konflik antara Lebanon dan Israel. Keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon pada awalnya dilatar belakangi oleh faktor kepentingan keamanan, hal tersebut dikarenakan letak geografi Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah Lebanon.<sup>18</sup>

Pada tahun 1973, situasi politik dan keamanan di Lebanon membara yang akhirnya meletus menjadi perang saudara pada April 1975. Di mata Suriah, Lebanon merupakan “halaman depan” yang harus bersih dari segala bentuk ancaman terhadap keamanan wilayah Suriah. Dilain pihak menurut kamus politik Suriah, bangsa Lebanon dan bangsa Suriah merupakan satu bangsa yang hidup dalam dua negara. Sehingga setiap kekacauan yang terjadi di Lebanon, betapa pun kecilnya akan dirasakan pahitnya oleh Suriah. Selain karena adanya perang saudara, ketidakstabilan keamanan di Lebanon semakin buruk karena sejak tahun 1968 Lebanon juga menjadi sasaran serangan Israel. Serangan Israel atas Lebanon dilatar belakangi oleh karena keberadaan para pejuang Palestina di negara tersebut. Kekuatan Israel di Lebanon didukung adanya kerjasama dengan pihak pemberontak di Lebanon, yaitu *South Liberation army*.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 206

<sup>16</sup> Weinberger, Naomi Joy (1986). *Syrian intervention in Lebanon : the 1975-76 civil war*. New York: Oxford University Press. Hlm 333

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 337.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 405.

Pada saat perang saudara di Lebanon mulai menyebar ke berbagai kota-kota dan provinsi, Suriah mengirimkan 35.000 personel pasukan militernya yang kemudian disebar mulai dari Sidon sebelah selatan Beirut sampai ke Tripoli di bagian utara Lebanon. Masuknya pasukan militer Suriah ke Lebanon merupakan atas permintaan berbagai kelompok yang memiliki pengaruh besar di dalam pemerintahan Lebanon. Bahkan Liga Arab sebagai organisasi berpengaruh di Timur-Tengah, melalui KTT Liga Arab di Riyadh pada tahun 1976, memberikan legitimasi atas keberadaan unit-unit militer Suriah di Lebanon, para delegasi negara-negara anggota Liga Arab lainnya menyatakan setuju dan mendukung masuknya pasukan militer Suriah ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian, dan hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon tidak dapat di tarik tanpa keputusan Liga Arab.<sup>20</sup> Suriah memprakarsai penyelesaian konflik di Lebanon melalui upaya gencatan senjata yang dilaksanakan pada Oktober 1976. Setelah upaya gencatan senjata dilakukan dan konflik secara terbuka bisa dilerai ternyata tidak mengakhiri keberadaan pasukan militer Suriah sebagaimana tujuan awal masuknya untuk meredakan perang saudara yang terjadi di Lebanon justru selanjutnya Suriah menjadi terlibat dengan berbagai masalah baru yang terjadi di Lebanon.

Upaya untuk mengakhiri keberadaan pasukan Suriah di Lebanon juga bukan tidak pernah ada, pada Oktober 1989 *Lebanese National Assembly* melakukan pertemuan di Taif-Arab Saudi guna membahas perjanjian diakhirinya perang saudara dan upaya

---

<sup>20</sup> Bando, Bantarto, 1991, *Timur tengah pasca perang teluk : dimensi internal dan eksternal*, Centre for Strategic and International Studies, Hlm 12.

dimulainya penarikan pasukan Suriah dari Lebanon, tetapi implementasinya tersendat karena interpretasi yang berbeda-beda mengenai perjanjian tersebut dan adanya tarik menarik kepentingan dari masing-masing kelompok berpengaruh di Lebanon sendiri. Tahun 2004 PBB melalui resolusi No.1559 mengeluarkan perintah terhadap pihak pemerintah Suriah untuk segera mengakhiri penempatan pasukannya dan sesegera mungkin menarik seluruh pasukan militernya dari Lebanon. Hal tersebut pada akhirnya terealisasi juga saat mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri terbunuh melalui insiden bom mobil pertengahan Februari 2005. Insiden tersebut menjadi hal serius bagi dunia internasional, karena adanya isu yang menuding keterlibatan pemerintah Suriah dalam kejadian tersebut. Akibat adanya insiden tersebut pula, pihak-pihak masyarakat Lebanon anti Suriah menganggap Suriah telah lalai dalam menjaga stabilitas keamanan internal Lebanon dan harus mengakhiri kebijakan negaranya dalam hal penempatan pasukan militernya di Lebanon.<sup>21</sup>

Pada pertemuan di Paris selama KTT pertama Uni Eropa untuk Mediterania, Presiden baru Lebanon, Michel Suleiman, dan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, sepakat untuk membangun hubungan diplomatik dan membuka halaman baru dalam hubungan antara kedua negara. Pada tanggal 14 Oktober 2008, Presiden Suriah Bashar Assad mengeluarkan Keputusan No 358, memerintahkan pembentukan hubungan diplomatik antara Suriah dan Lebanon, dan pembukaan kedutaan Suriah

---

<sup>21</sup> *Pasukan Terakhir Suriah Tinggalkan Libanon*, <http://tempo.co.id/hg/luarnegeri/2005/04/26/brk.20050426-31.id.html> diakses tanggal 25 Januari 2015

di Lebanon. Pengumuman Keputusan itu diawali dengan kesepakatan bersama presiden Suriah dan Lebanon, Bashar Assad dan Michel Suleiman, selama kunjungan Suleiman ke Damaskus pada tanggal 13 Agustus 2008. Setelah kunjungan, Lebanon mengeluarkan Keputusan No. 268, untuk menyiapkan kedutaan Lebanon di Suriah.

Sehari setelah keputusan Suriah, Menteri Luar Negeri Lebanon Fawzi Salloukh datang ke Suriah untuk berkunjung. Dia bertemu dengan Bashar Assad dan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Mualllem. Pada pagi hari 15 Oktober kedua menteri menandatangani pengumuman bersama yang menyatakan bahwa hubungan diplomatik akan dibentuk. Mereka mengatakan bahwa Suriah dan Lebanon yang diinginkan untuk memperkuat "hubungan persaudaraan yang sangat baik antara kedua negara adik," berdasarkan saling menghormati kedaulatan dan kemandirian masing-masing. Dalam menjawab pertanyaan wartawan, menteri luar negeri Suriah mengatakan bahwa duta besar Suriah akan diangkat sebelum akhir tahun 2008.<sup>22</sup> Pada bulan Desember 2008, Kedutaan Besar Suriah dibuka di Beirut untuk pertama kalinya sejak kedua negara mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1940-an. Pada bulan Maret 2009, Lebanon membuka kedutaan besarnya di Damaskus. Pada tanggal 19 Desember 2009, Perdana Menteri Lebanon Saad Al-Hariri mengunjungi Suriah, dan tinggal di Damaskus selama 3 hari pertemuan dengan Presiden Bashar Al-Assad. Ini adalah pertama kalinya Suriah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Lebanon

---

<sup>22</sup> *Suriah dan Lebanon Buka Hubungan Diplomatik*, <http://www.dw.de/suriah-dan-lebanon-buka-hubungan-diplomatik/a-3565221> diakses tanggal 24 Januari 2015

secara formal, sejak kedua Negara mendapatkan kemerdekaannya masing-masing dari Perancis pada tahun 1940-an. Hal ini menunjukkan perubahan arah dalam kebijakan luar negeri Suriah terhadap Lebanon, karena semenjak kemerdekaan yang diberikan oleh Perancis kepada Lebanon, para nasionalis Suriah telah menolak untuk mengakui kemerdekaannya, dan menganggap kemerdekaan Lebanon sebagai buatan, sebuah kemerdekaan yang tidak sah karena diciptakan oleh imperialis.<sup>23</sup>

### **Keentingan Suriah dalam Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Lebanon**

Suriah sebagai negara dengan letak geografi yang luas yaitu 185.180 km<sup>2</sup> dan populasi penduduk 2,584 juta jiwa dan sumber daya alam yang melimpah maka Suriah ingin mengamankan sumber daya alam tersebut dengan meningkatkan keamanan dan integritas wilayah. Walaupun Suriah mempunyai kekuatan militer yang kuat dengan persenjataan yang cukup memadai tetapi Suriah pernah kalah dalam perang melawan Israel dengan kehilangan dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Untuk mewujudkan kebijaksanaan dasar politik luar negeri Suriah yang menganut paham nasionalisme progresif, anti imperialisme dan zionisme, yang diabdikan untuk kepentingan kebangkitan kembali bangsa Suriah pada khususnya dan bangsa-bangsa Arab pada umumnya. Politik luar negeri Suriah juga diarahkan untuk mencapai cita-cita menuju masyarakat modern yang menganut ajaran sosialis, bebas dari penguasaan penjajah/Israel yang oleh karena itu terutama Dataran Tinggi Golan (wilayah Suriah yang diduduki Israel

---

<sup>23</sup> "Syria boosts diplomatic ties with Lebanon". Christian Science Monitor. 15 Oktober 2008.

sejak 1967) harus dikembalikan melalui penyelesaian secara damai.<sup>24</sup>

Dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Lebanon maka dapat meningkatkan *national power* Suriah dengan menjadikan Lebanon sebagai *buffer state* karena Lebanon berbatasan langsung dengan Israel dan adanya kelompok-kelompok perlawanan yang pro Suriah yang dapat membantu Suriah melancarkan serangan-serangan yang berdomisili di Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan Israel.

### Kesimpulan

Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang mulai berkembang dan diperhitungkan keberadaannya pasca era Perang Teluk. Suriah sebelumnya pernah dijajah oleh Kekaisaran Ottoman dari Turki selama hampir 400 tahun, yaitu sejak 1517 hingga masa Perang Dunia I di tahun 1918. Pada masa lalu Suriah memiliki wilayah yang sangat luas di sebelah timur Laut Mediterania, wilayah ini yang kemudian terpecah akibat dari Imperialisme Barat menjadi beberapa negara yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, Provinsi Turki Hatay, Israel dan Palestina yang sebagiannya di akui sebagai Israel.

Perancis dengan politik *divide et impera* nya berhasil membagi Suriah sendiri menjadi empat wilayah antara lain : Damaskus, Lebanon Raya, Aleppo dan Lantakia. Tahun 1925 Damaskus dan Aleppo dikembalikan kepada Suriah. Perancis pada tanggal 28 September 1941 memberikan kemerdekaan kepada Suriah, dan diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941.

Pada tahun 1980 kondisi di Lebanon ditandai dengan kemunculan milisi-milisi

---

<sup>24</sup> *Ibid*

baru bersenjata yang sebagian besar berafiliasi dengan negara lain. Hizbullah (Syiah), Partai Nasional Liberal (Maronit), Tauhid (Sunni), Murabitun (Sunni), Tentara Pembebasan Palestina (PLO), gerakan nasional (Nasseris) dan Jihad Islam (Syiah). Hizbullah, Tauhid, dan Jihad Islam mempunyai hubungan erat dengan Iran, sedangkan PLO dan gerakan Nasional mendapat dukungan dari Suriah dan Partai Nasional Liberal mendapat dukungan dari Israel.<sup>25</sup> Hal ini dibuktikan bahwa semakin tajamnya fragmentasi dari berbagai pihak, Islam, Kristen, Palestina dalam konflik di Lebanon. Tiga milisi pro Iran yaitu Hizbullah, Tauhid dan Jihad Islam menginginkan negara Islam modern Iran di Lebanon sedangkan NPL dan SLA (South Lebanon Army) menghendaki Lebanon bekerjasama dengan Israel. Suriah melihat perkembangan perang saudara di Lebanon tersebut sebagai kesempatan untuk mengembalikan Lebanon kepada Suriah, sesuai keinginan Suriah untuk mewujudkan Suriah Raya seperti keinginan Presiden Suriah Hafiz Al Ashad. Karena sebenarnya Suriah tidak menyetujui pembentukan negara Lebanon yang berdiri sendiri. Suriah beranggapan bahwa Lebanon merupakan ciptaan politik kolonial Perancis bahwa sebelum Perancis masuk Suriah pada abad ke XIX Lebanon, Turki, Yordania, Israel dan Propinsi Hatay di Turki merupakan bagian dari wilayah Suriah.<sup>26</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Lebanon merupakan bagian dari Suriah. Hal tersebut menjadi salah satu sebab Suriah tidak menginginkan kemenangan pada konflik di Lebanon, karena Suriah menginginkan berdirinya

---

<sup>25</sup> Riza Sihbudi, *op.cit*, hlm 34.

<sup>26</sup> Bannerman, *The Syria Arab Republic, dalam The Government and Politics*, hlm 784

pemerintahan di Beirut dibawah kekuasaan Damaskus. Hal inilah yang menyebabkan Suriah tidak pernah membuka hubungan diplomatik resmi dari Lebanon dan antara Suriah dan Lebanon tidak ada perwakilan kedutaan.

Hubungan Suriah dan Lebanon putus akibat pembunuhan mantan perdana menteri Lebanon Rafiq Hariri di Beirut pada 2005, Lebanon menuduh Suriah mendalangi pembunuhan itu dan Suriah akhirnya menarik pulang pasukannya. Keinginan Suriah mewujudkan Suriah Raya dengan menjadikan Lebanon masuk dalam wilayah Suriah dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Lebanon dan putusnya hubungan Suriah-Lebanon akibat Lebanon menuduh Suriah terlibat dalam pembunuhan mantan perdana menteri Lebanon Rafiq Hariri menunjukkan sikap politik luar negeri Suriah terhadap Lebanon. Perubahan politik luar negeri Suriah terhadap Lebanon pada tanggal 15 Oktober 2008 dengan membuka hubungan diplomatik dengan Lebanon berdasarkan surat keputusan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memuluskan jalan bagi pembukaan hubungan diplomatik penuh dengan Lebanon. Keputusan ini menegaskan pembentukan hubungan diplomatik antara Republik Arab Suriah dan Republik Lebanon serta pembentukan misi diplomatik pada tingkat duta besar di ibu kota Lebanon, Beirut. Pembukaan hubungan diplomatik Suriah dan Lebanon dilakukan setelah pertemuan kedua presiden yang menyepakati sejumlah hal, antara lain, pembahasan ulang garis perbatasan wilayah Lebanon dan Suriah, pembukaan kedutaan besar, serta kerjasama militer. Pernyataan ini menegaskan kembali keinginan kedua belah pihak untuk menegaskan dan mengkonsolidasikan hubungan dengan dasar saling menghormati kedaulatan dan

kemerdekaan masing-masing dan memelihara hubungan persaudaraan kedua negara yang bersahabat untuk merespon aspirasi rakyat kedua negara.<sup>27</sup>

Jadi, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan Suriah menjalin hubungan diplomatik dengan Lebanon dikarenakan adanya kepentingan nasionalnya yaitu kepentingan keamanan militer dan integritas wilayah antara Suriah dan Lebanon.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Bambang Sunaryono, *Pengantar Ilmu Politik: Kekuasaan Politik*, diktat kuliah, Jurusan Hubungan Internasional, Univ. Muhammadiyah Yogyakarta

Drs. Riza Sihbudi dkk. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

---

<sup>27</sup> *Setelah 60 Tahun, Suriah-Libanon Sepakat Jalin Hubungan Diplomatik*, <http://www.jisc.eramuslim.com>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2014 Pukul 21.00 WIB

George Lenczowski. 1992. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Harwanto Dahlan. 1995. *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*. UMY: Diktat kuliah

K.J Holsti. 1993. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta: Erlangga

Kirdi Dipoyuda, *Timur Tengah dalam Pergolakan*, CSIS, Jakarta, 1992

Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. 1999. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon

Plano, Jack C, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin. 1986. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali

S.L.Roy. "Diplomasi". 1991. Jakarta: Rajawali

Sofyan Efendi, *Unsur-unsur Pengertian Ilmiah*, Jakarta, LP3ES.

Sufri Yusuf. 1989, "Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri": Sebuah Analisis Teori dan Uraian tentang Pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Trias Kuncahyono. 2013. *Musim Semi Suriah: Anak-Anak Sekolah penyulut Revolusi*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku

### **Jurnal**

Jurnal masalah agama, budaya, sosial dan politik Timur Tengah. Fakultas Sastra dan

Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol. 5, No.1

### **Website**

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (DJKPI). *Kerjasama Multilateral*

Ok. <[http://ditjenkpi.kemendag.go.id/webseite\\_kpi/index.php?module=news\\_detail&news\\_category\\_id=4&news\\_sub\\_category\\_id=69](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/webseite_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=4&news_sub_category_id=69)>Diakses 18 Februari 2014

*Suriah-Lebanon Sepakat Melawan Israel,*

<http://www.jisc.eramuslim.com> diakses pada tanggal 7 Juli 2014 Pukul 20.15WIB

*Setelah 60 Tahun, Suriah-Libanon Sepakat Jalin Hubungan Diplomatik,* <http://www.jisc.eramuslim.com>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2014 Pukul 21.00 WIB

